

Edisi Pemilwa 2022

# Indimolor

GELITIK BEBAS POLUSI



## Laporan Utama

Kelalaian Koordinasi Sebabkan Inkonsistensi  
Syarat Administratif

## Laporan Khusus

Pengunduran Diri Berujung Aklmasi

Versi Berwarna



Rp1.500,00.-



## Kotak Redaksi

**Indimolor Gelitik Bebas Polusi** diterbitkan oleh Divisi Penelitian dan Pengembangan LPM Indikator Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. **Redaksi:** Habib (CO), Al, Alexander, Bagus, Dickzha, Hanif, Idham, Iqbal, Izra, Nurharyanti, Rahmatullah, Rohan, Syifa, Tri, Feti, dan tim pendukung. **Tata Letak:** Tim Kreatif Indikator. **Alamat Redaksi/Pemasaran:** Lt. II Gedung Aktivitas Kemahasiswaan FEB UB, Jalan MT. Haryono 165 Malang 65145. **Email:** [lpmindikatorfeb@ub.ac.id](mailto:lpmindikatorfeb@ub.ac.id). **Web:** [lpmindikator.com](http://lpmindikator.com) Redaksi menerima tulisan dalam bentuk apapun. Naskah diketik dan dikirim dalam bentuk soft copy. Redaksi berhal menyunting tanpa mengurangi maksud dan tujuan penulisan. Tulisan dikirim ke alamat di atas.



@lpmindikator



@LPMIndikator



@owc2290y

## Berjalan di Tengah Tantangan

**B**agai kapal layar dalam samudra penuh ombak, laju penggarapan terus berjalan dengan segala tantangan. Semangat kami masih panas dalam dinginnya Kota Malang. Kurangnya profesionalitas menjadi alasan kami datang dan pergi. Tuntutan untuk terus menggarap produk di tengah Ujian Akhir Semester pun menjadi rintangan. Namun, pada akhirnya semua halangan terlewati hingga produk ini dapat dinikmati.

Indimolor kali ini membawakan Laporan Utama yang berisi tentang kurangnya koordinasi diantara Panitia Penyelenggara. Tak hanya itu, mundurnya salah satu bakal calon Dewan Perwakilan Mahasiswa Departemen Manajemen turut mengisi laporan khusus. Hadirnya rubrik-rubrik lain juga tak kalah menarik untuk dibaca.

**LPM Indikator**



## Kelalaian Koordinasi Sebabkan Inkonsistensi Syarat Administratif

Pemilihan Wakil Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (Pemilwa KM FEB UB), merupakan agenda rutin yang diadakan setiap setahun sekali. Tujuan acara ini adalah untuk memilih tujuh Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) serta Ketua dan Wakil ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) sebagai representasi KM FEB UB. Rangkaian Pemilwa tahun ini diselenggarakan dari tanggal 17 November hingga 22 Desember 2022. Dalam rangka menyukseskan penyelenggaraan Pemilwa, dibentuklah kepanitiaan yang terdiri atas Penanggung Jawab (PJ), Panitia Pelaksana (Panpel), dan Panitia Pengawas (Panwas). Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang (UU) Pemilwa pasal 1 Ayat 10.

Panpel dalam hal ini mengemban

tugas penting untuk mengoordinasikan semua tahapan pelaksanaan Pemilwa sesuai dengan apa yang tercantum di UU Pemilwa Pasal 12 ayat 3. Bukan hanya itu, dalam UU Pemilwa Pasal 13 ayat 3 dinyatakan pula wewenang Panpel untuk berkoordinasi dengan PJ serta Panwas terkait penyelenggaraan dan pelaksanaan Pemilwa. Namun, kondisi di lapangan justru menunjukkan hal sebaliknya. Panpel tidak melakukan koordinasi dengan PJ dan Panwas dalam pembuatan salah satu produk hukum, yakni syarat administratif.

Fenomena tidak adanya koordinasi ini juga diafirmasi oleh pernyataan **Elieva Septia Putri** selaku Ketua Panpel. Dirinya menjelaskan bahwasanya memang terjadi sebuah keluputan koordinasi, dimana dalam penyusunan syarat administratif hanya melibatkan Wakil Ketua Pelaksana

(Wakapel) dan inti acara saja. Sementara itu, PJ baru mengetahui kondisi tersebut setelah ada konfirmasi dari KM berkaitan dengan adanya ketidaksesuaian syarat administratif dengan UU Pemilwa. Kondisi ini juga diperkuat oleh pernyataan **Reskiawan Latamara** selaku Koordinator Divisi (Kodiv) Acara. “Kalau *seingat* saya memang masalah syarat, mekanisme, dan sebagainya itu *tuh dikerjain* sama Asisten Koordinator Acara, kemudian ya langsung di *publish aja* seingatku *tuh*,” i m b u h n y a .

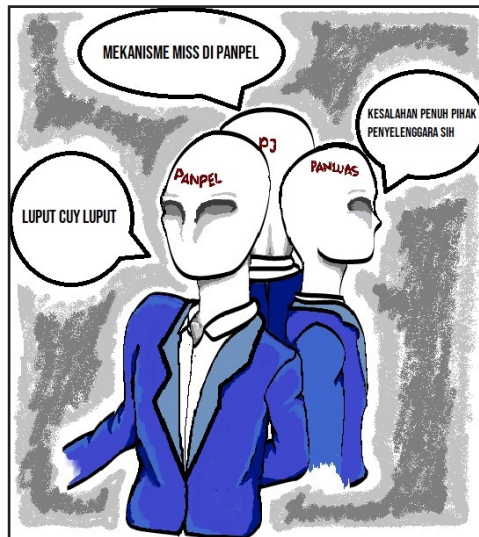
**Muhammad Ashari Musyaffa** selaku Ketua PJ pun ikut berko-mentaris berkenaan dengan ketiadaan koordinasi dalam p e n y u s u n a n syarat administratif. Ia menyampai-kan, “Secara etikanya itu mengeluarkan berkas tersebut setelah diawasi oleh PJ ataupun Panwas, tetapi ada meka-nisme yang *miss* di situ oleh Panpel, *gak* diadakan forum antara Panpel, Panwas, dan PJ.”

Melalui penelusuran lebih lanjut, ditemukan fakta bahwasanya kelalai-an Panpel menjadi penyebab utama atas fenomena tidak adanya koordinasi

dalam pembuatan syarat administratif. Mepetnya waktu diduga menjadi salah satu sumber kelalaian yang ter-jadi. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Kodiv Acara, di mana keterbatasan waktu menyebab-kan keluputan komunikasi antar penyelenggara. Pernyataan senada disampaikan oleh Ketua Panpel, kelu-putan koordinasi juga terjadi pada staf terkait dalam pembuatan syarat administratif.

Ketiadaaan koordinasi ini lantas mengaki-batkan ketidak-sesuaian syarat p e n d a f t a r a n administratif Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM serta Calon Anggota DPM. Ketidaksesuaian tersebut nampak dalam syarat

administratif Nomor 17 dengan UU Pemilwa KM FEB UB Pasal 24 Ayat 2 Poin s, yang berkaitan dengan ruang lingkup sertifikat kepanitiaan. Hal tersebut kemudian diklarifikasi oleh penyelenggara pada akun Instagram Pemilwa melalui penerbitan Surat Keputusan Permohonan Maaf. Ada-pun dampak turunan dari ketidaksi-nambungan prasyarat tersebut, yakni timbulnya kebingungan dan kesalah-



Indikator/Al



pahaman pada ranah KM FEB UB. “Adanya *misunderstanding* dari KM juga *sebenarnya* untuk mendaftar menjadi peserta pemilu ini boleh gak sih untuk punya *sertif* di luar FEB kan gak boleh jadi ada *miss* di situnya,” ujar Ketua Panpel. Hal serupa juga disampaikan oleh Kodiv Acara, “Pasti juga berdampak pada calonnya kan ada kesalahpahaman dan calonnya jadi harus memastikan lagi kepada panitia penyelenggara,” ujarnya. Dampaknya pun tidak hanya dirasakan oleh KM FEB UB saja, namun juga berbalik kepada pihak panitia penyelenggara. “Karena adanya miskomunikasi ini, yang pertama pastinya terkait dengan citra penyelenggara itu sendiri ke KM FEB UB. kan pastinya kita dianggap dari penyelenggara itu kurang teliti dan sebagainya,” ungkap Kodiv Acara.

Melihat dampak yang terjadi, solusi perlu diberikan untuk memastikan permasalahan kurangnya koordinasi tidak terulang kembali. Salah satunya dengan memberikan pemahaman yang lebih baik atas mekanisme dan landasan UU Pemilu terhadap Panpel. **Ridho Febrian** selaku Calon Ketua BEM mengungkapkan “Perlu adanya semacam menganalisis lebih dalam perihal segala kebutuhan, karena itu kan sesuai dengan UU. Itu sebagai landasan yuridis dalam syarat administrasi. Jangan sampai yang terdapat dalam UU itu nyatanya ada yang gak ada, atau bahkan ada yang

tidak diatur dalam UU itu *dimasukkan*,”. Selain itu, **Refa Dita** selaku Calon DPM Ilmu Ekonomi mengungkapkan perlunya perbaikan dalam segi koordinasi dan melakukan musyawarah hingga menemukan solusi atas permasalahan yang ditemui. Solusi lain pun turut diberikan oleh salah satu Calon DPM Akuntansi, **Rahmat Hidayat**. Ia menyampaikan perlunya meminta nasehat dan saran dari panitia pada periode sebelumnya yang dinilai memiliki pemahaman serta pengetahuan lebih mendalam sebagai bagian dari masukan.

**Alexander Sigit Atmaja**  
Editor: Ittaqa Ramadhian P.





## Penerapan Aklamasi Jalan Alternatif dalam Pengkhianatan Demokrasi

Oleh: Iqbal Nurrizqi\*

Editor: Rafa Fahriela P.

Indonesia adalah negara yang mengutamakan demokrasi, di mana kekuasaan tertinggi ada pada rakyat. Sebagai negara demokrasi, hak dan kewajiban yang diberikan pada setiap warga negara harus sama, termasuk dalam proses berjalannya pemilihan umum (Pemilu). Perjalanannya pun mengutamakan penggunaan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luber Jurdil) yang berfokus pada kesamaan hak rakyat dalam Pemilu.

Apabila terjadi kekurangan bakal calon, Undang-Undang (UU) Pemilu tahun 2017 pasal 235 ayat 4 menjelaskan bahwa waktu pendaftaran akan diperpanjang selama 2 x 7 hari. Pada pasal yang sama di ayat 6, ditegaskan dalam hal setelah dilaksanakan perpanjangan pendaftaran, dan tetap terjadinya calon tunggal maka akan dilakukan pemilihan sesuai dengan ketentuan UU. Selain itu, menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 6A, calon juga harus mendapatkan lebih dari 50% suara untuk dilantik.

Pemilihan Wakil Mahasiswa

Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (Pemilwa KM FEB UB) juga mengandung asas Luber Jurdil. Selain itu, prinsip demokrasi yang sama dengan Pemilu di Indonesia turut dianut dalam ajang kontestasi ini. UU Pemilwa KM FEB UB Pasal 39 menyatakan bahwa yang akan dilantik berdasarkan hasil perolehan suara terbanyak. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kesamaan skema dengan Pemilu di Indonesia. Namun, pemilihan yang dilaksanakan pada penghujung tahun ini menggunakan sistem aklamasi. Dalam UU Pemilwa KM FEB UB Pasal 41 ayat 2, aklamasi adalah mekanisme pemilihan yang dilakukan tanpa melalui pemungutan suara. Sistem ini membuat calon yang ada dapat langsung terpilih tanpa harus melewati mekanisme pemilihan terlebih dahulu.

Lebih lanjut, pada UU Pemilwa KM FEB UB Pasal 23, apabila terjadi kekurangan bakal calon maka akan dilakukan perpanjangan waktu selama 3 x 24 jam. Jika setelah perpanjangan waktu bakal calon masih bersifat

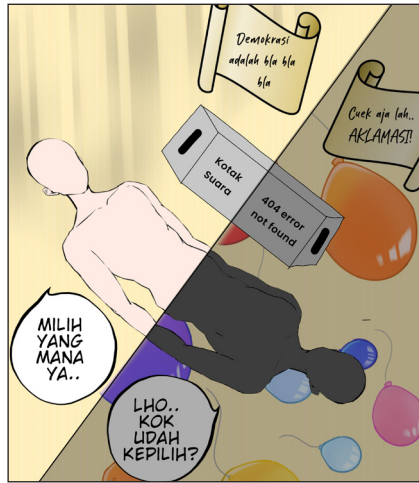
tunggal, proses pemilihan akan diserahkan kepada Musyawarah Umum Mahasiswa (MUM) FEB UB. Nantinya, MUM FEB akan menetapkan aklamasi beserta mekanismenya di dalam forum.

Adanya penerapan mekanisme aklamasi menyebabkan tidak terwujudnya demokrasi di KM FEB UB. Mekanisme aklamasi yang diserahkan kepada MUM FEB menimbulkan adanya perbedaan hak, seperti yang digambarkan dalam Anggaran Rumah Tangga KM FEB UB. Masalahnya, hak suara pada MUM FEB hanya dimiliki anggota tetap yang terdiri dari 7 DPM terpilih dan Ketua Lembaga Otonom, kecuali Ketua BEM FEB UB. Hal ini memberi arti bahwa keputusan yang ditetapkan di MUM FEB hanya mewakili setidaknya 17 orang secara langsung. Jumlah ini bahkan tidak mencapai 1% dari total KM FEB UB yang aktif. Melihat kondisi sekarang, keterbatasan calon DPM Departemen dan Independen serta pasangan Ketua dan Wakil Ketua BEM FEB UB mendorong sistem aklamasi di tahun ini. Kondisi yang tidak ideal ini menimbulkan mimpi

buruk bagi KM FEB UB dengan terhapusnya hak mereka sebagai pemilih.

Fakta di atas menunjukkan penerapan aklamasi pada Pemilwa KM FEB UB tidak sesuai dengan prinsip demokrasi. Untuk menyamakan hak seluruh pemilih dalam Pemilwa KM FEB UB, pihak DPM bisa memulainya dengan merevisi UU Pemilwa FEB UB. Sistem aklamasi yang pada awalnya dijadikan alternatif dari kondisi keterbatasan calon dapat

dihapus. Sebagai gantinya, DPM dapat mengembalikan sistem kotak kosong yang pernah diimplementasikan di FEB UB pada Pemilwa sebelumnya. Hal ini mengingat sistem kotak kosong tidak menghilangkan unsur pemilihan dalam Pemilwa. Sistem kotak kosong dapat merestorasi demokrasi dengan mengembalikan hak suara pada KM FEB UB yang hilang pada tahun ini.



Indikator/Al

**\*Mahasiswa Departemen Ilmu Ekonomi  
Angkatan 2022**



**Malu Bertanya Sesat di Jalan**



**Menyimak Pembicaraan**



**Forumnya Sepi**

Foto dan Judul: Nurharyanti Iswar

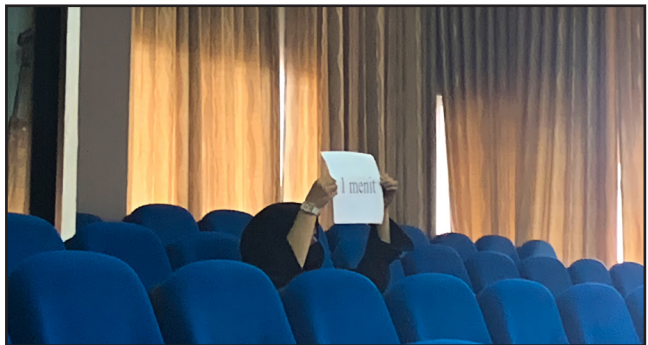




**Minum Dulu Rek, Haus**



**Obrolan di Sela-Sela Forum**



***Time is Over***

Tata Letak: Feti Nur Shaila



## Pengunduran Diri Berujung Aklamasi

**B**erdasarkan Surat Ketetapan Musyawarah Umum Mahasiswa Departemen Manajemen (SK MUMDM) Istimewa tanggal 29 November 2022 telah ditetapkan tiga bakal calon anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM). Namun, keesokan harinya salah satu bakal calon anggota DPM Manajemen atas nama **Juan Raymond Manurung** mengundurkan diri dari pencalonan. Aksi Juan pun menuai pro dan kontra, lantas apakah tindakan tersebut diperbolehkan?

Pemilihan Wakil Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (PEMILWA KM FEB UB) adalah sarana pelaksanaan kedaulatan mahasiswa yang diselenggarakan di tingkat fakultas. Hal ini dijelas-

kan dalam Undang-Undang (UU) PEMILWA KM FEB UB 2022 pasal 1 ayat 9. Lebih lanjut, pada pasal 3 ayat 1 menjelaskan kegiatan ini wajib dilaksanakan setahun sekali. Adapun tujuan diselenggarakannya PEMILWA KM FEB 2022 disampaikan oleh **Elieva Septia Putri** selaku Ketua Pelaksana. “PEMILWA merupakan sarana untuk memilih tujuh anggota DPM dan satu pasang Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa, tujuannya untuk menciptakan dan membentuk kedaulatan di KM FEB itu sendiri.”

Dalam pelaksanaannya, PEMILWA dibagi menjadi dua, yaitu PEMILWA KM dan PEMILWA Departemen. **Fadilah Dwi Indah Arifah**, Ketua Pelaksana PEMILWA Manajemen, memaparkan bahwasanya PEMILWA KM melingkupi fakultas untuk memi-

lih anggota DPM dan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM). Sedangkan, PEMILWA Departemen bertujuan untuk memilih Ketua Himpunan. Hal ini sejalan dengan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga Himpunan Mahasiswa Departemen Manajemen (HMDM) menjelaskan bahwa PEMILWA Manajemen diselenggarakan untuk memilih bakal calon anggota DPM serta ketua HMDM.

Merujuk pada UU PEMILWA 2022 Pasal 22 ayat 2, jumlah minimal calon DPM adalah tiga orang per departemen. Melalui SK M U M D M I s t i m e w a , Departemen Manajemen telah mengesahkan pemenuhan kuota bakal calon DPM.

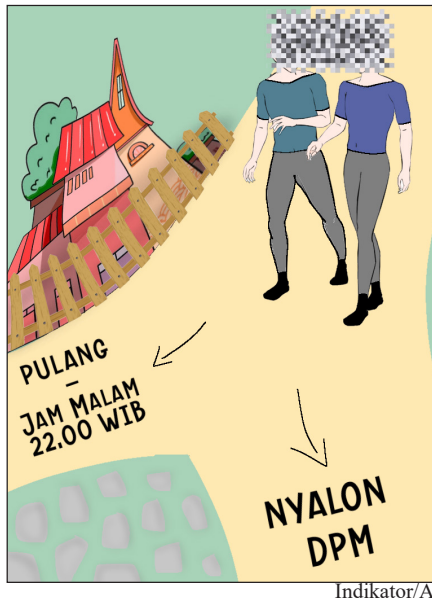
Nama-nama yang tercantum dalam SK tersebut di antaranya, Mohammad Furqon, Mohammad Rifqy Nuryana, dan Juan Raymond Manurung. Namun salah satu bakal calon atas nama Juan Raymond Manurung mengundurkan diri dari pencalonan sehari setelah SK tersebut ditetapkan. **Miftah Irsyad** selaku Ketua HMDM mengatakan, “Seharusnya tidak diperbolehkan mengundurkan diri karena ketetapan

dan SK-nya juga sudah ada.”

Penyebab pengunduran diri Juan dari bakal calon DPM Manajemen dikarenakan alasan pribadi. Berdasarkan notulensi MUMDM Istimewa pada 30 November 2022, Juan menyampaikan, “Posisi sudah semester lima dan ke depannya semester enam, saran dari orang tua untuk memfokuskan ke akademik dan gak ada organisasi lagi. Maka dari itu saya mohon maaf karena tidak bisa melanjutkan.” Berbagai upaya telah dilakukan untuk menghubungi Juan, namun hingga tulisan ini diterbitkan yang bersangkutan menolak dimintai keterangan mengenai kemunduran dirinya sebagai bakal calon DPM. “Kemarin itu bilanganya karena terkendala perizinan

dari orang tua,” ucap Miftah, yang juga menjadi anggota tetap pada sidang MUMDM Istimewa 2022.

Pengunduran diri Juan sebagai bakal calon DPM merupakan hal yang tidak diperbolehkan. Hal ini telah diungkapkan oleh Miftah sebelumnya. Diperlukan sanksi yang lebih tegas agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Fadilah mengungkapkan, “Solusi kedepannya biar tidak terulang lagi,



mungkin bisa diatur untuk sanksi yang lebih tegas.”

Penyebab selanjutnya adalah karena pihak MUMDM yang terburu-buru dalam meyakinkan Juan. Miftah menjelaskan bahwa ia sudah mencoba membujuk Juan, begitu pun dari pihak panitia dan DPM. Namun, usaha itu gagal dan Juan tidak merespons hingga forum berakhir. Gagalnya upaya tersebut dikarenakan pihak MUMDM yang dianggap terburu-buru, hal tersebut disampaikan oleh **Mohammad Rifqy Nuryana**, Calon DPM Manajemen. “Karena dari pihak MUMDM mungkin belum lebih meyakinkan Juan ataupun terburu-buru atau *gimana*.” Lebih lanjut, menurutnya kaderisasi menjadi alasan utama MUMDM yang terburu-buru. Selaras dengan Rifqy, **Ferry Dwi Ardyansyah** selaku DPM Manajemen mengungkapkan, “Karena ada transisi dari *online* ke *offline* jadi-nya berdampak, mungkin di luring kurang kaderisasi.”

Berdasarkan hal tersebut, muncul solusi untuk lebih memantapkan kaderisasi dan sistem *leadership*. “Dari aku sih berorganisasi itu tidak hanya berhubungan dengan eksternal tapi internal juga,” ucap Rifqy. Hal ini dilakukan agar kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang kembali ke depannya.

Terdapat dua dampak yang cukup fatal mengenai pengunduran diri Juan dari bakal calon DPM Manajemen. Pertama, mundurnya *timeline*

PEMILWA, dilihat dari adanya *extend* yang dilakukan beberapa kali. Hal tersebut dibenarkan oleh Ferry, “Dampaknya, *timeline* itu mundur.” Selain mundurnya *timeline*, dampak selanjutnya diungkapkan oleh Miftah, yakni kuota bakal calon yang tidak terpenuhi sehingga diadakan sistem aklamasi. “Nanti insyaallah *abis* ini MUMDM Istimewa buat pemenuhan bakal calon DPM, kalau memang tidak bisa berarti harus diaklamasi,” ujar Fadilah.

Ada beberapa harapan yang diungkapkan oleh pihak penyelenggara. Salah satunya datang dari Ferry, “Harapannya untuk PEMILWA Manajemen hal-hal dan masalah seperti itu tidak terulang kembali, agar ke depannya lebih baik.” Pengunduran bakal calon juga menunjukkan rendahnya antusiasme dan kesadaran mahasiswa dalam PEMILWA Manajemen. Fadilah berharap mahasiswa Departemen Manajemen dapat meningkatkan antusias mereka untuk maju dalam pencalonan PEMILWA Manajemen. Sependapat dengan Fadilah, Miftah menyayangkan apabila demokrasi ini tidak berjalan dengan baik akibat kurangnya bakal calon. “Harapannya bisa ditingkatkan lagi *sih* kesadaran mahasiswa manajemen,” tutupnya.

**Izra Putri Wayusra**

Editor: Syafiq Muhammad Mufid

## Aktif di Organisasi, Tak Hentikan Prestasi

**K**ecantikan bulan tak memalingkan tatapanku dari layar *handphone*. Ada yang tak kalah cantik dari bulan di malam itu. Namanya Carolline Mathilda Nggebu, mahasiswi semester 7 Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (FEB UB). Ia acap disapa Carolline, putri asal Pulau Dewata, Bali.

Carolline memilih Kota Malang sebagai tempat perantaraan karena ingin menantang diri menemukan *value* yang tidak didapatkan di kampung halaman. Cuaca menjadi hal yang sempat menyamankan tatkala tiba di Malang. Mahasiswi berusia 21 tahun itu mengira Malang tak sedingin yang ada di benaknya. Bahasa pun sempat menyukarkan walau banyak yang mendakwa Bahasa Jawa dan Bali memiliki keselarasan.

Tahun pertama sebagai mahasiswi dilaluinya dengan mengikuti berbagai lomba. Carolline kerap muncul dalam perolehan penghargaan nasional bahkan internasional. Perempuan kelahiran Denpasar itu pernah ke Phoenix, Arizona untuk berlomba melawan 81 negara lain dan berhasil menjuarainya.

Carolline juga berhasil menduduki posisi kedua dalam ajang Mahasiswa Berprestasi FEB UB 2022. Bahkan, di pagelaran Economics Golden Night Awards 2021, ia berhasil meraih penghargaan sebagai pembawa acara terfavorit.

Prestasi yang menakjubkan tak membuatnya terfokus dalam bidang akademik saja. Ia juga tertantang menggeluti organisasi kemahasiswaan.



dok. pribadi

**Nama : Carolline Mathilda N.**  
**TTL : Denpasar, 25 Februari 2001**

Pada tahun 2022, ia dipercaya menjadi Kepala Departemen Komunikasi dan Informasi Himpunan Mahasiswa Departemen Akuntansi. Menginjak semester 7, Carolline tak lagi memprioritaskan penghargaan sebagai sesuatu yang harus diraih. Namun, tidak

meraih penghargaan bukan berarti berhenti menjadi yang terbaik. Akhir tahun ini, perjalanan baru akan ditempuhnya sebagai pekerja magang di salah satu perusahaan Big Four. Pada waktu yang bersamaan, sosok inspiratif ini juga berjuang menyusun skripsi dan berusaha menyelesaikannya tepat waktu.

**Dickzha Emerald**

Editor: Syafiq Muhammad Mufid





## Sosok di Balik Perjuangan Britania Raya

Menjadi seorang pemimpin tak hanya soal jabatan, namun harus mampu mendengar aspirasi rakyatnya. Sosok tersebut tercermin dalam diri Winston Churchill di Film *Darkest Hour*. Film yang rilis pada tahun 2017 ini mengisahkan perjuangan Churchill dalam menyelamatkan Britania Raya dari ancaman invasi Jerman. Ia ditugaskan untuk menggantikan Perdana Menteri sebelumnya yang diminta mundur oleh pihak oposisi di parlemen. Churchill dipilih sebagai Perdana Menteri karena dianggap mampu meminta dukungan dari seluruh parlemen.

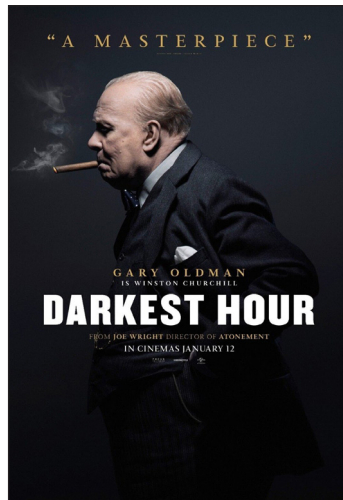
Sebagai Perdana Menteri yang baru, Churchill dihadapkan dengan kenyataan bahwa invasi Jerman ke Britania Raya dapat terjadi sewaktu-waktu. Ia memiliki pendirian bahwa Britania Raya tak boleh melakukan negosiasi damai dengan Jerman. Berbeda dengan Churchill,

Raja George VI dan Parlemen Britania Raya ingin melakukan negosiasi damai dengan Jerman. Hal tersebut menjadikan Churchill merasakan dilema.

Garry Oldman yang berperan sebagai Churchill tampil sangat

apik di film ini. Ia sangat menjiwai karakter Churchill sebagai pribadi keras kepala dan gigih. Tak hanya itu, eloknya visualisasi dalam film ini seolah-olah membawa kita ke dalam kondisi Britania Raya yang sedang kesulitan. Hal yang disayangkan dalam film ini ialah pembangunan karakter pendukung kurang baik dan terkesan terlalu berfokus kepada Churchill. Ter-

lepas dari segala kelebihan dan kekurangannya, film ini sangat bagus untuk dinikmati karena dapat memberikan referensi mengenai sosok pemimpin hebat yang tergambar dalam diri Churchill.

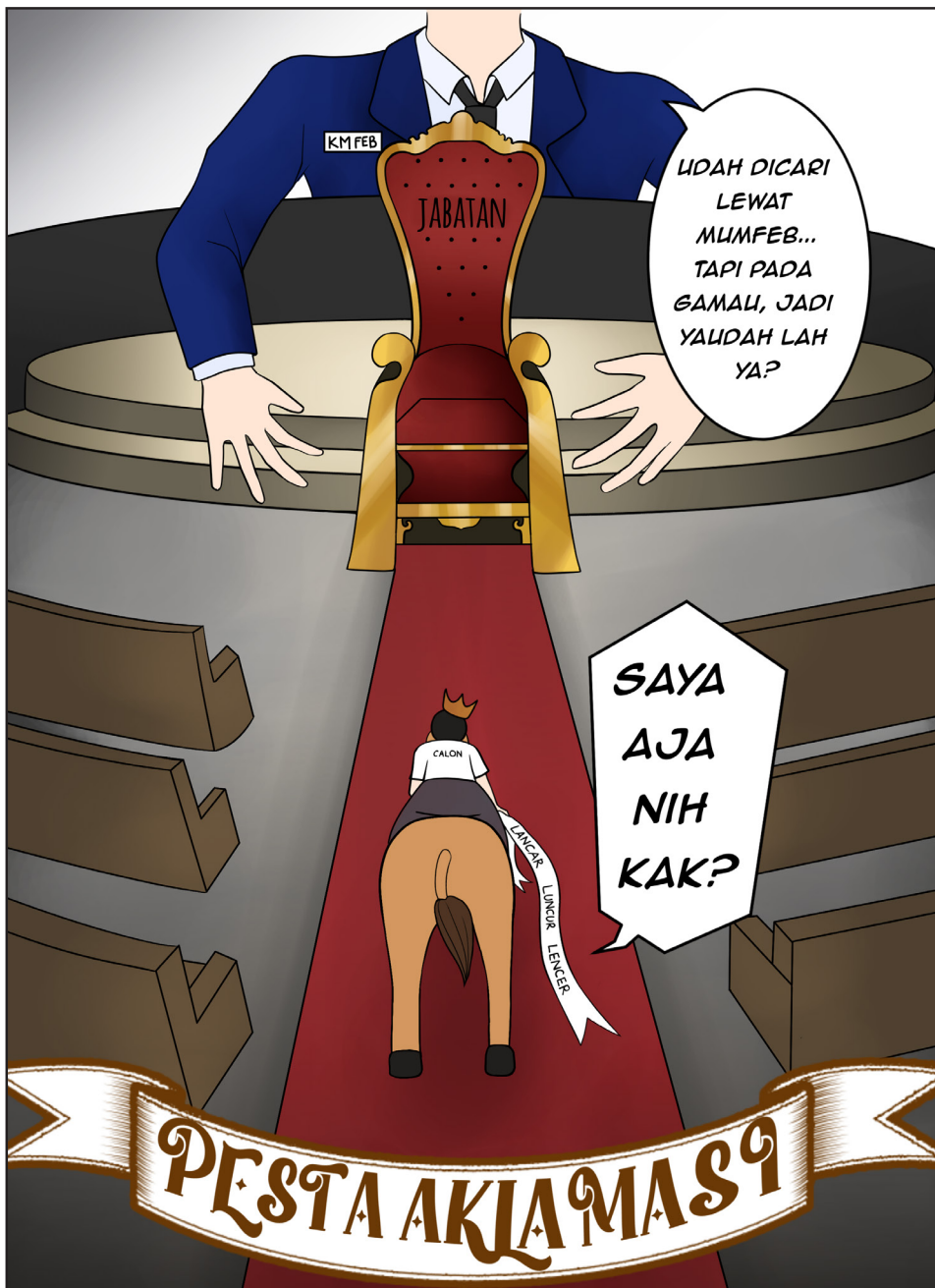


dok. istimewa

**Judul : Darkest Hour**  
**Sutradara : Joe Wright**  
**Durasi : 125 Menit**

**Bagus Titan Wijaya**  
Editor Sinta Kurnia W.

# KARIKATUR



Tri Rapiq Laoga  
Editor Rafa Fahriela P.



**KOS BU ANNA**  
JL WATUGONG NO 20  
 **08885518095**

## **TERIMA KOS PUTRA MUSLIM**



### **FASILITAS:**

**KAMAR MANDI LUAR**

**KAMAR 3X4 M**

**SPRINGBED, LEMARI, MEJA KUTSI BELAJAR, WIFI**